

ANALISIS DIALEKTIKA HEGEL DALAM “DESAK ANIES”: SEBUAH PENDIDIKAN DEMOKRASI

Eky Erlanda Edel¹, Syihabuddin², Raden Sasnitya³

^{1,3}Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia

²Universitas Pendidikan Indonesia

¹ekyedel24@upi.edu, ²syihabuddin@upi.edu, ³Radensasnitya29@upi.edu

Abstact

This research aims to analyze Anies Baswedan's thinking patterns, particularly during dialogues, using Hegelian Analysis, which emphasizes the process of thesis, antithesis, and synthesis in the dynamics of social-political conflict and resolution. This study also highlights the importance of democratic education in facilitating critical and in-depth understanding of political issues. The research employs a qualitative approach with content analysis and narrative analysis methods, using Hegelian Dialectics to identify the thesis, antithesis, and synthesis in Anies Baswedan's thoughts and the "Desak Anies" program in Semarang, as covered by MetroTV and uploaded in February 2024. Data collection techniques include literature review from various sources, content analysis of the "Desak Anies" program, and public documentation of the program on YouTube. Keywords: two or more important, specific, or representative words or phrases for the journal. Based on the results, Anies Baswedan typically answers questions in a structured dialogue format with standard composition: introduction, content, and conclusion. He does this to demonstrate his understanding of the thesis (initial condition), antithesis (opposing condition), and synthesis (improved condition). Throughout this process, Anies Baswedan always provides examples as reasoning to help his interlocutors understand the logic he wants to convey. Therefore, Anies Baswedan does not answer briefly because he tends to explain at length to ensure clarity. This approach fosters enthusiasm among the public, especially Millennials and Generation Z, to be politically aware; they are motivated to learn about Indonesian politics and to decide on the best future leaders for them. The concept of "Desak Anies" illustrates how democratic principles can be simply exemplified by a leader.

Keywords: *Hegelian Analysis; Anies Baswedan; Desak Anies; Democratic Education*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika. Bicara tentang negara demokrasi, maka ada sebuah pertanyaan sederhana, namun penting untuk direnungkan, “Bagaimanakah ciri-ciri negara demokrasi?” Rangkuti (2023) menyebutkan beberapa ciri utama Negara demokrasi: 1) adanya pemilihan umum yang diikuti oleh warga negara secara aktif pada setiap proses politik, 2) adanya perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia yang mencakup kebebasan berpendapat, beragama, hak atas privasi, dan perlindungan dari diskriminasi, 3) pemerintah yang berdasarkan hukum yang berlaku secara transparan dan demokratis, 4) adanya kebebasan pers dan media dimana keberagaman media justru akan memberikan ruang pandang dan informasi yang dinamis, 5) sistem politik kompetitif yang memungkinkan partai politik bersaing secara sehat dan mendorong akuntabilitas politik, 6) pemisahan kekuasaan dalam bentuk eksekutif (pemerintah, legislatif (parlemen), dan yudikatif (peradilan), 7) pemberian kewenangan kepada rakyat dimana pemerintah harus membuat keputusan/ kebijakan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi rakyatnya. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap proses kehidupan bernegara adalah keharusan. Lalu, tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam proses tersebut tidak dapat dipisahkan dari komposisi demokrasi masyarakat Indonesia yang dewasa ini dibentuk oleh generasi Milenial dan Z yang seringkali diidentikkan dengan generasi digital; selalu terhubung dengan teknologi digital dan internet. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk terakhir pada 2020, dari 270,2 juta jiwa populasi Indonesia, sebanyak 53.81% diantaranya adalah gabungan generasi Milenial dan Z dengan rincian 27.94% untuk generasi Z dan 25.87% untuk generasi Milenial. Artinya, suara kedua generasi digital tersebut dalam pesta demokrasi Indonesia mampu memberikan dampak yang signifikan pada keputusan/ kebijakan yang akan diambil oleh

pemerintah terpilih dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat digital seperti menggunakan media Youtube, WhatsApp, Instagram, facebook, dan Twitter (Soekarwo, 2021).

Namun, apakah penggunaan media/ teknologi digital sebagai sarana publikasi dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dapat dianggap cukup dalam mendukung upaya pendidikan demokrasi yang sehat? Tentu tidak. Media/ teknologi digital tersebut hanyalah alat yang dapat digunakan oleh seorang/ sekelompok figur politik untuk mengkomunikasikan tujuan politisnya. Berhasil atau tidaknya penggunaan media/ teknologi digital tersebut tergantung branding figur tersebut di mata masyarakat. Dalam kancah perpolitikan Indonesia, Anies Rasyid Baswedan adalah sosok dengan segudang prestasi yang menginspirasi baik di level nasional atau internasional. Berdasarkan situs aniesbaswedan.com (2024), beliau mulai dikenal masyarakat Indonesia secara luas sebagai rektor termuda (37 tahun) di Universitas Paramadina pada tahun 2007-2014 beserta berbagai inisiasinya pada berbagai gerakan yang berdampak, seperti: Pelatihan Pemuda Desa Tertinggal di Kalimantan dan Jawa (mulai 1994), Gerakan Indonesia Mengajar (mulai 2009), Gerakan Indonesia Menyala (mulai 2011), Kelas Inspirasi (mulai 2012), dan Gerakan Turun Tangan (mulai 2013). Lalu, melanjutkan karir politiknya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2014-2016), Gubernur DKI Jakarta (2017-2022), hingga mencalonkan diri sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2024 lalu. Dalam situs tersebut, Anies Baswedan mencitrakan dirinya sebagai seseorang yang, “mendengarkan permasalahan dan menjawab tantangan krisis dengan cara yang humanis.” Citra yang melekat tersebut kemudian diusung menjadi program “Desak Anies” sebagai sarana kampanye yang memungkinkannya untuk menggaet suara pemilih dari generasi muda dengan menunjukkan kebiasaannya berdialog secara langsung dengan calon pemilihnya tanpa takut dikritik (CNN Indonesia, 2024). Anies Baswedan menunjukkan bahwa dalam berdemokrasi yang inklusif dan representatif itu penting untuk menekankan kedaulatan rakyat, kesetaraan politik, dan keterlibatan warga negara sebagai fondasi dalam sistem pemerintahan modern melalui program tersebut dengan mengusung konsep demokrasi seperti partisipasi, tanggung jawab, dan daya tanggap untuk menjembatani kesenjangan komunikasi antara elit politik dan masyarakat Pancasila yang menghargai keberagaman, pluralisme, dan kesejahteraan bersama (Diamond, Baiocchi & Ganuza, Huntington, McLeod & MacIntyre dalam Maspul, 2024) dalam Program “Desak Anies”, masyarakat dari berbagai level.

Meskipun, secara umum citra seorang Anies Baswedan sangat menjanjikan, namun masih banyak dari generasi Milenial dan Z yang meragukan kapasitasnya untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia. Anies seringkali dianggap “muter-muter” atau “terlalu teoritis” saat menjawab pertanyaan, padahal menurut Refli Harun-seorang dosen, pakar hukum & tata negara, serta pengacara Indonesia dalam RMOL.ID; Republik Merdeka (2024), Anies Baswedan adalah seseorang dengan tipikal dialogis, bukan teriak-teriak. Dia juga membandingkan gaya bicara seorang Prabowo atau Megawati misalnya yang cenderung *frankly speaking*, atau seorang Ganjar yang cenderung “blunder” dan kurang menghargai lawan bicaranya. Artinya, setiap orang pasti memiliki gaya berbicara yang berbeda-beda selama dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan efektif, terstruktur dan terarah. Pertanyaannya, apakah betul seorang Anies Baswedan tidak dapat menyampaikan ide-idenya secara efektif, terstruktur, dan terarah saat berdialog di ruang publik?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola berpikir Anies Baswedan khususnya saat berdialog dengan menggunakan metode Analisis Hegel yang menekankan pada proses tesis, antithesis, dan sintesis pada sebuah dinamika konflik dan resolusi sosial-politik. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan demokrasi dalam memfasilitasi pemahaman kritis dan mendalam terhadap isu-isu politik. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam bidang filsafat politik dan kebahasaan.

METODE PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI

Teori dialektika Hegel adalah pendekatan filosofis yang menekankan pada proses perkembangan melalui konflik dan penyelesaian. Konsep utama dalam dialektika Hegel meliputi:

- Tesis, Antitesis, Sintesis: Tesis adalah kondisi awal yang dihadapi oleh antitesis yang berlawanan, dan melalui proses dialektis, keduanya diatasi oleh sintesis, menghasilkan kondisi baru yang lebih maju dan bahkan dapat menjadi kebenaran yang absolut seiring

waktu. Ketiga bagian tersebut adalah cara berpikir yang seharusnya ada dalam pikiran manusia saat menghadapi permasalahan sosial, budaya, bahkan negara. Dialektika terjadi ketika realitas selalu ditopang oleh negasi (eksistensi lainnya) dan kontradiksi (ketidaksiharian/ sumber perubahan) dengan membawa unsur-unsur seperti logika, filsafat alam dan filsafat roh (Aziz, 2022). Penelitian ini ingin melihat proses dialektika Anies Baswedan yang dapat menghasilkan perubahan dan perkembangan dalam konteks demokrasi.

- Relevansi dalam Analisis Sosial: Dialektika Hegel sering digunakan untuk menganalisis perubahan sosial dan konflik, memahami bagaimana perubahan terjadi melalui resolusi kontradiksi. Misalnya dalam penelitian terdahulu tentang Dialektika Hegel, Aziz (2022) menyimpulkan bahwa Pancasila lahir berdasarkan kebutuhan negara yang dilandasi oleh proses yang sangat rasionalis; adanya proses dialektika antara tesis dan antithesis yang melahirkan sintesis untuk keberagaman masyarakat Indonesia. Rohani (2022) juga menyebutkan bahwa Dialektika Hegel dapat meningkatkan kemampuan kritis siswa pada pembelajaran IPS abad 21 di SMP dibandingkan menggunakan pola pengajaran yang cenderung membosankan, seperti penyampaian pola ceramah, terpaku pada buku teks saja, dan level evaluasi kognitif yang rendah (mengingat/ menghafal) saja tanpa menekankan pada tingkat pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi levelnya (aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi).

Penelitian ini juga melihat bagaimana Program “Desak Anies” menjadi ruang dalam pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan partisipasi aktif, pemikiran kritis, dan kesadaran politik masyarakat sebagai pemilih aktif. Pendidikan demokrasi akan menciptakan masyarakat yang sadar hak dan kewajibannya dalam bernegara sehingga alur pemerintahan dan perangkatnya dapat diawasi dengan baik (Fatiha, 2022). Prinsip utama pendidikan demokrasi meliputi:

- Partisipasi Aktif dan Kesadaran Politik: Prof. Ikrar Nusa Bhakti, Ph.D sebagai peneliti senior dari BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dalam sebuah kegiatan di Fisipol UMY menyampaikan bahwa dalam sejarah perubahan perpolitikan Indonesia, semuanya diinisiasi oleh berbagai gerakan pemuda yang banyak membaca dan mengikuti perkembangan politik yang terjadi untuk kemudian mampu menyampaikan gagasannya (UMY, 2023). Artinya jika pemuda tidak ikut “melek” politik, maka proses demokrasi tersebut akan dijalankan oleh sekelompok orang yang berkepentingan saja.
- Keadilan dan Kesetaraan: Berdasarkan data dari Freedom House, Indonesia sebagai negara demokrasi mengalami full democratic state pada masa pemerintahan Presiden SBY di tahun 2006-2013, namun mengalami penurunan sejak tahun 2014-2014 selama masa pemerintahan Presiden Jokowi (UMY, 2023). Hal ini tentu perlu disikapi secara kritis dan serius karena sebagai negara demokrasi yang mendukung keadilan dan kesetaraan dalam berbagai perbedaan, generasi Milenial dan Z yang berpikiran terbuka, melek politik, memiliki akses dunia digital/ teknologi diharapkan mampu menyebarkan dan menjaga nilai-nilai toleransi dalam persaingan politik, menyaring berita hoaks, dan ujaran kebencian (KPU, 2023).
- Pemikiran Kritis: Kemampuan berpikir kritis dapat diaktivasi jika seseorang sering terlatih menghadapi masalah-masalah yang tidak biasa, yang membutuhkan pemikiran mendalam, kritis, kreatif, namun tetap terstruktur. Berpikir kritis berarti mencoba menghubungkan berbagai bagian dari pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk mampu memecahkan sebuah masalah dalam proses mental yang efektif dan handal. Perkin dalam Rohani (2022) menyebutkan bahwa berpikir kritis memiliki 4 karakteristik, yakni: 1) mencapai penilaian kritis terhadap apa yang akan diterima atau dilakukan dengan alasan logis, 2) memakai standar penilaian sebagai hasil dari berpikir kritis dan membuat keputusan, 3) menerapkan berbagai strategi yang tersusun dan memberikan alasan untuk menentukan dan menerapkan standar, 4) mencari dan menghimpun informasi yang dapat dipercaya untuk dipakai sebagai bukti yang mendukung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola berpikir Anies Baswedan khususnya saat berdialog dengan menggunakan metode Analisis Hegel yang menekankan pada proses tesis, antithesis,

dan sintesis pada sebuah dinamika konflik dan resolusi sosial-politik. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan demokrasi dalam memfasilitasi pemahaman kritis dan mendalam terhadap isu-isu politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten dan analisis naratif dengan pendekatan Dialektika Hegel dengan mengidentifikasi tesis, antithesis, dan sintesis pemikiran Anies Baswedan dan program “Desak Anies” Semarang yang diliput oleh MetroTV dan diunggah pada Februari 2024. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dilakukan dengan melakukan tinjauan literature dari berbagai sumber, melakukan analisis konten dari Program “Desak Anies” dan dokumentasi publik dari program tersebut di YouTube.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program “Desak Anies” di Semarang yang diliput secara langsung dan diunggah oleh MetroTV di laman YouTube seminggu menjelang Pemilihan Presiden 2024. Peneliti mengambil data dengan menonton dan menyalin percakapan yang terjadi selama sesi tanya-jawab Anies Baswedan dengan beberapa penonton dari berbagai jenis latar belakang usia, pekerjaan, yang hadir di program tersebut. Terdapat 15 tesis, antithesis, dan sintesis yang ditemukan dalam kurun waktu 2.5 jam berdialog dengan topik-topik seputar keadilan yang tidak merata, prinsip demokrasi yang dilanggar, penggunaan anggaran pemerintah untuk kepentingan kampanye salah satu paslon presiden, wacana revolusi mental yang gagal, TKW Indonesia, UMKM & Pasar Tradisional, E-Sport dan industrinya, Pelecehan Seksual, Kesejahteraan Pensiunan, Akses Disabilitas, Kebijakan Sekolah untuk kegiatan Non-Akademik, Limbah dan Lingkungan, UKT di Universitas, dan Distribusi Dokter di Wilayah Indonesia. Data-data tersebut dianalisis melalui metode Dialektika Hegel yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Data-data tersebut sudah mengalami pengurangan dari transkrip aslinya dan hanya menyisakan inti penjelesan pada bagian sintesis. Data-data tersebut merupakan 11 data yang ditemukan dari total 15 data.

No	Tesis	Antithesis	Sintesis
1	Negara tidak menjalankan pemerintahan yang adil dan merata.	Banyak rakyat yang tidak merasa diwakili kebutuhannya oleh Negara secara paripurna.	It's time for chance, sudah saatnya kita berubah.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari kondisi awal (tesis) terlihat bahwa indikasi tentang negara yang tidak menjalankan pemerintahan adil dan merata menciptakan kondisi yang berlawanan dari rakyat (antithesis). Dalam hal ini, Anies Baswedan merumuskan solusi untuk menuju perubahan dimana pemerintahan yang adil dan merata tersebut dapat diwujudkan melalui visi-misi kampanye Anies Baswedan.

No	Tesis	Antithesis	Sintesis
2	Keberpihakan dan andilnya Presiden Jokowi dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran yang sangat jelas konflik kepentingannya. Jokowi dianggap melanggar etika dalam berdemokrasi.	Terjadi gerakan “turun gunung” guru-guru besar dari berbagai kampus di Indonesia yang menyatakan sikap dan pendapatnya tentang demokrasi yang sudah menyimpang. Mereka menyebut keadaan ini sebagai “darurat demokrasi”.	Setiap kampus memiliki pandangan masing-masing, namun ketika berhubungan dengan Negara, pandangan mereka akan sama; jangan rendahkan proses demokrasi, jangan rendahkan etika karena itu prinsip yang harus dijunjung apapun afiliasi partai politiknya. Demokrasi itu minimal ada 3 hal; 1) ada oposisi, 2) adanya kebebasan berbicara, 3) pemilu yang bebas. Pada kebebasan berbicara, kita mengalami penurunan yang luar biasa, buktinya banyak kaos yang bertuliskan “Wakanda No More, Indonesia Forever.” Oposisi juga harusnya memiliki kesempatan yang sama, tanpa

interupsi dari pihak lain, dan tidak boleh dianggap sebagai melawan, ini pemikiran mandiri, masa ga boleh. Lalu, pemilu yang bebas. Kita akan lihat, apakah pada 14 Februari nanti Indonesia pada akhirnya keluar sebagai Negara dengan demokrasi yang matang? Kita di sini bertanggung jawab secara konstitusional menyelamatkan demokrasi pada saat Pemilu 14 Februari besok. Jangan biarkan Pemilu besok diambil alih oleh mereka-mereka yang ingin melanggengkan ketimpangan di Republik ini.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari kondisi awal (tesis) terlihat bahwa indikasi tentang pemerintahan Jokowi yang cenderung memenangkan pihak tertentu dan banyak melakukan pelanggaran prinsip dan etika demokrasi yang menciptakan gerakan “darurat demokrasi” dari berbagai level akademisi di Indoensia (antithesis). Dalam hal ini, Anies Baswedan merumuskan solusi untuk tetap teguh menyuarakan jika terdapat ketimpangan dalam demokrasi dan keberadaan oposisi adalah indikasi yang sehat.

No	Tesis	Antitesis	Sintesis
3	Disinyalir Anies Baswedan akan menghapus BUMN dan menggantinya dengan koperasi kalau menang sebagai presiden.	Banyak pegawai BUMN yang ketak-ketir takut jika itu terjadi (Anies menang Pemilu) mereka akan kehilangan pekerjaan.	Justru BUMN harus ditata ulang, karena keliatannya BUMN kita ini sudah banyak yang mengalami problem yang terlalu besar. Kita tidak usah bahas disini problemnya apa, karena akan menambah pikiran Tapi tentang itu tidak benar, itu adalah fitnah dan fitnah yang tidak masuk akal. Kemudian, kami tegaskan, ke depan BUMN adalah BUMN yang menjalankan fungsi Negara. Negara itu punya dua fungsi, 1) Birokrasi, spt kementerian, dinas, badan, 2) Korporasi seperti BUMN dan BUMD yang keduanya melakukan pembangunan.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari kondisi awal (tesis) terlihat bahwa indikasi tentang isu Anies Baswedan akan menghapus BUMN jika terpilih sebagai presiden 2024 yang menciptakan kekhawatiran di kalangan pegawai BUMN (antithesis). Dalam hal ini, Anies Baswedan menyampaikan bahwa niatnya bukan menghapus, tetapi membenahi hal-hal yang perlu dilakukan di BUMN itu sendiri, misalnya terkait fungsi dan tugasnya.; ada hal yang lebih mudah prosesnya justru melalui BUMN daripada melalui kementerian.

No	Tesis	Antitesis	Sintesis
4	Anggaran Bansos jelang Pemilu Presiden 2024 mendadak ditambah bahkan sampai dirapel. Jumlah anggaran ini lebih besar dari jumlah anggaran bansos yang digelontorkan pada	Rakyat meanggap itu adalah sesuatu yang janggal. Ada kecurigaan bahwa ini dilakukan karena unsur politis.	Bansos itu tujuannya untuk kepentingan si penerima, bukan si pemberi. Dan Bansos itu bukan milik si pemberi tetapi dari hasil pajak rakyat. Sudah saatnya kita mengembalikan Bansos tanpa pamrih, jangan Bansos yang penuh pamrih. Dan kita harus kampanyekan ini sama-sama bahwa ini adalah bukan uang pribadi. Itu tadi ada yang menuliskan “Bansos

masa Covid 19 lalu.	kui seko pajak rakyat, ora sek dompetmu dewe.” Saya merasa makin yakin bahwa rakyat kita rakyat Indonesia makin hari makin kritis apalagi semua mengungkapkan soal bansos ini jadi mudah-mudahan haknya diterima tapi hak suaranya tidak digadaikan.
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan perubahan yang signifikan pada anggaran Bansos jelang Pilpres 2024 yang bahkan jumlahnya lebih luas dari jumlah anggaran Bansos pada masa Covid 19 (tesis) yang dilihat rakyat sebagai sesuatu yang janggal dan sarat kepentingan politik (antithesis). Dalam hal ini, Anies Baswedan menyampaikan bahwa kedepan Bansos harusnya diberikan sesuai dengan jadwalnya sehingga tidak ada kepentingan golongan berkuasa yang bisa menungganginya. Selain itu, pemerintah dan rakyat harus tahu bahwa uang Bansos itu dianggarkan dari uang pajak rakyat, jadi bukan semata-mata milik penguasa.

No	Tesis	Antitesis	Sintesis
5	Menjelang Pilpres ada kenaikan gaji ASN.	Rakyat meanggap itu adalah sesuatu yang janggal. Ada kecurigaan bahwa ini dilakukan karena unsur politis.	Mudah-mudahan kedepan kenaikan bisa lebih rutin. Kami juga berencana untuk TNI, Polri, dan ASN untuk mendapatkan peningkatan gaji secara rutin secara tahunan dengan satu hal yang pasti; kenaikan berdasarkan kinerja harus ditingkatkan, kondisi perekonomian serta dilakukan secara regular, bukan insidental karena peristiwa politik.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari kondisi awal (tesis) ada kenaikan gaji ASN jelang Pilpres 2024 yang dianggap rakyat terlalu politis (antithesis). Dalam hal ini, Anies Baswedan menyampaikan bahwa kenaikan-kenaikan tersebut adalah hal yang baik hanya saja jangan didasari oleh sesuatu yang bersifat politik. Harusnya ini dilakukan secara terjadwal dan terorganisir. Jika terpilih nanti, Anies Baswedan juga akan menganggarkan kenaikan gaji secara rutin untuk TNI dan Polri.

No	Tesis	Antitesis	Sintesis
6	Pemerintah dalam 10 tahun terakhir mengaungkan “Revolusi Mental”, tetapi justru pada akhir-akhir ini mencontohkan hal-hal yang jauh dari kata revolusi mental.	Banyak yang mempertanyakan apakah revolusi mental itu sukses atau gagal?	Revolusi mental itu ramai dibahas di 2014 dan ada sebuah artikel yang ditulis oleh Pak Jokowi soal itu; revolusi mental, 10 mei 2014. Ide tentang revolusi mental itu baik, tapi dalam perjalanannya, dia tidak lagi jadi fokus perhatian. Dia tidak menjadi pegangan. Karena itu, menurut kami harus dikerjakan, kenapa? Karena isinya baik, misalnya kemandirian dan reformasi ekonomi. Dikatakan bahwa kebijakan investasi luar negeri SDA agar tidak dikuras perusahaan asing, itu menurut artikel itu. Apakah sekarang jadi kenyataan? Nah, itu perlu dikoreksi. Jadi saya melihat ini sebuah gagasan yang baik tapi belum terlaksana dengan baik. InsyaAllah ketika bertugas ini akan dituntaskan supaya bisa menjadi kenyataan di Indonesia.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari kondisi awal (tesis) terlihat bahwa gagasan tentang Revolusi Mental adalah sesuatu yang tinggal wacana saja dan meninggalkan pertanyaan besar; apakah gagasan tersebut berhasil atau gagal (antithesis). Dalam hal ini, Anies Baswedan menyampaikan ide tentang Revolusi Mental itu sendiri adalah hal yang baik, namun seiring waktu tidak lagi menjadi fokus pemerintah.

No	Tesis	Antitesis	Sintesis
7	TKW Indonesia rata-rata adalah pembantu rumah tangga. Negara yang kaya raya ini seringkali hanya mengirim tenaga kerja dengan level pendidikan paling rendah. Selain itu, dari Serikat Buruh Migran diketahui kurangnya peraturan tentang perlindungan TKW. Ada beberapa daerah sudah ada peraturan perlindungan TKW tersebut, tapi Jawa Tengah belum ada.	Rakyat butuh program agar tidak perlu keluar negeri untuk bekerja.	Pasar tenaga kerja bukan hanya domestic, tetapi juga global. Kita berharap rakyat Indonesia dapat berpartisipasi tidak hanya domestik, tetapi juga global. Tapi partisipasinya harus memiliki kompetensi, skill sehingga ketika mereka aktif menjadi tenaga kerja dimanapun, mereka mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan perlindungan, dan mereka bisa bekerja sebagaimana pekerja-pekerja professional lainnya. Untuk itu harus ada program sebagai koreksi dari apa yang ada sekarang. 1) Negara harus mengajak aktivis yang mengurus pekerja migran selama ini untuk menginformasikan apa yang dibutuhkan pekerja migran dan apa yang Negara dapat lakukan sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi. 2) kemudian peraturan pemerintah akan disesuaikan dengan hal tersebut.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari kondisi awal (tesis) terlihat bahwa Indonesia seringkali mengirimkan TKW dengan level pekerjaan terendah dan kurangnya perhatian pemerintah dalam meningkatkan perlindungan pekerja tersebut yang menciptakan kekhawatiran di kalangan TKW untuk tidak bekerja lagi di luar negeri dan menuntut pemerintah untuk menciptakan program pekerjaan untuk mereka (antithesis). Dalam hal ini, Anies Baswedan menyampaikan bahwa pada prinsipnya TKW adalah sesuatu yang baik selama mereka dipersiapkan dengan baik dari skill, kompetensi dan kebutuhan sehingga bisa bersaing dengan pekerja tingkat domestik dan global, jadi tidak ada yang harus dihindari untuk jadi TKW. Untuk itu, negara harus melakukan *need analysis* kebutuhan para TKW dengan bekerja sama dengan para aktivis yang mengurus pekerja migran sehingga peraturan/ kebijakan pemerintah selanjutnya akan disesuaikan dengan hasil *need analysis* tersebut.

No	Tesis	Antitesis	Sintesis
8	Pasar tradisional sangat sepi terutama sejak banyak market digital seperti TikTok, juga ditambah dengan adanya Alfamart, indomaret.	Rakyat butuh program yang dapat melindungi ritel-ritel kecil agar tidak tergerus dengan perkembangan teknologi, dll tersebut.	Prinsip dalam mengembangkan UMKM adalah bagaimana yang kecil itu tumbuh dan yang besar tidak dimusuhi. Apa yang perlu dilakukan? 1) Akses permodalan, 2) Regulasi pasar yang adil dan yang tidak menyulitkan pihak manapun. Yang kecil bisa berkembang, yang besar biar berkembang di kawasan yang besar pula, tanpa menggerus yang kecil. Dan itu harus ada komitmen dari Negara, 3) pendampingan untuk manajemen, karena rakyat menginginkan produk-produk yang diambil memiliki kualitas yang baik.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari kondisi awal (tesis) terlihat bahwa ada sekelompok masyarakat yang sulit menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi sehingga pendapatan mereka menurun yang menciptakan kekhawatiran di kalangan pelaku bisnis UMKM (antithesis). Dalam hal ini, Anies Baswedan menyampaikan bahwa yang dilakukan pemerintahan adalah adanya akses permodalan yang mudah bagi semua pihak, regulasi yang adil, dan pendampingan UMKM.

No	Tesis	Antitesis	Sintesis
9	E-sport dan industrinya yang berkembang pesat di Indonesia. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa E-sport mampu mengangkat perekonomian.	Rakyat butuh program yang dapat meningkatkan pertumbuhan E-sport di Indonesia.	Pertama, Negara harus mengakui bahwa e-sport adalah salah satu cabang olahraga yang mengalami perkembangan pesat. Nomor satu adalah pengakuan. Jika diakui, maka yang kedua turunannya adalah kemudahan dan fasilitas. Diberikan segala macam kemudahan supaya bisa berprestasi, membuka lapangan pekerjaan, membawa nama baik Indonesia di dalam Liga Utama. Kalau mau kompetisi, izinnnya dimudahkan, butuh tempat, jangan diperibet. Itu komitmen. Ketiga, Negara jangan merasa paling tahu. Datangi stakeholder di industry ini, lalu rumuskan apa yang dibutuhkan agar ekosistem gamers tumbuh subur di Indonesia, setelah itu pemerintah siapkan regulasinya. Lalu saya yakin recruitment akan berjalan dengan baik, anak-anak baru akan bermunculan, prestasi baru, anda akan jadi coach. Lalu terakhir, Negara akan memberikan apresiasi. Siapa saja yang pernah menjadi juara dunia, dia akan mendapatkan khusus dari Negara. Siapa saja yang pernah membawa Indonesia di kancah internasional, harus dapat apresiasi.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari kondisi awal (tesis) terlihat bahwa E-sport terbukti dapat meningkatkan perekonomian Indonesia yang berarti rakyat membutuhkan program atau kebijakan yang dapat menumbuhkan industri ini lebih pesat lagi (antithesis). Dalam hal ini, Anies Baswedan menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang dapat dilakukan: mengakui E-sport sebagai cabang olahraga yang sangat menjanjikan, lalu diberikan fasilitas yang diperlukan seperti kemudahan izin kegiatan, kemudian pemerintah harus berkoordinasi dengan berbagai stakeholder yang mengerti cabang olahraga tersebut, dan yang terakhir adalah memberikan apresiasi yang pantas untuk semua atlet yang berprestasi.

No	Tesis	Antitesis	Sintesis
10	Tentang isu perempuan bahwa RUTPKS sudah disahkan, tapi kasus pelecehan seksual masih banyak terjadi dan penanganannya belum efektif, bahkan kejadian itu	Banyak perempuan yang mengalami kasus pelecehan seksual yang tidak tahu harus bagaimana, sementara untuk melaporkan perlu bukti. Pada banyak kasus, pelecehan	Data menunjukkan bahwa 87% korban kekerasan pada perempuan, pelakunya adalah orang terdekat, dan kurang dari 40% yang dapat diselesaikan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran bahwa masalah perlindungan pada perempuan adalah salah satu prioritas penting dalam kepemimpinan nasional. Jika bukan jadi perhatian dari pemerintahan tertinggi, maka

<p>terjadi juga di wilayah kampus oleh civitas akademik. Pelaku tidak ditindak dengan tegas, bahkan bebas.</p>	<p>seksual terjadi saat korban tidak siap untuk menyimpan bukti. Kebijakan seperti apa yang dapat diupayakan?</p>	<p>kebawahnya itu sulit akan ada action. Waktu saya menjabat di Jakarta, ada kejadian seorang pejabat, kepala dinas yang melakukan pelecehan seksual, apa yang saya lakukan , 1) menon-aktifkan pejabat tersebut selama penyelidikan berlangsung, 2) melakukan penyelidikan dengan tim yang disusun untuk menemukan bukti-bukti. 3) jika ditemukan bukti kongret, maka ybs langsung diberhentikan, 4) Korban harus bisa lapor, misalnya bisa dial 112, dan jika harus melakukan prosedur pemeriksaan di RS maka difasilitasi tanpa biaya tanpa lihat KTP, 5) menyiapkan rumah aman untuk korban, 6) ada pendampingan psikis dan medis dibantu pemerintah. Harapannya dapat mencegah dengan tindakan yang tegas dan bila ada kejadian dapat membantu recovery sampe pulih, dan pelaku harus dihukum yang setimpal sesuai hukum yang berlaku. Kami ingin Indonesia itu menjadi tempat yang aman bagi perempuan, lansia, disabilitas, dan anak-anak.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari kondisi awal (tesis) menunjukkan UU tentang pelecehan seksual tidak membuat perubahan yang signifikan untuk pelaku dan korban yang menciptakan kekhawatiran bagi banyak korban, terutama perempuan untuk bertindak dan perlu ada kebijakan lain untuk memperkuat posisi korban (antithesis). Dalam hal ini, Anies Baswedan menyampaikan bahwa hal yang dapat dilakukan adalah dengan bertindak tegas pada terduga pelaku walaupun belum ada kejelasan secara hukum. Terduga akan do non-aktifkan dari pekerjaannya sambil terus diproses hukum, dan jika terbukti maka pelaku langsung diberhentikan dari pekerjaannya. Korban juga jadi lebih aman selama proses hukum itu berlangsung, dan aka nada pendampingan bagi korban dalam berbagai bentuk fasilitas.

No	Tesis	Antithesis	Sintesis
11	<p>Tidak ramahnya akses untuk disabilitas di kampanye Anies.</p>	<p>Anies selalu menggaungkan tentang kepedulian pada disabilitas, di Youtube ada bahasa isyarat, tapi disini tidak ada, tadi diawal masuk oleh panitia, tapi setelah itu dilepas. Untuk akses duduk juga susah, mungkin yang mau datang itu banyak dari disabilitas, tapi banyak fasilitas yg tidak ramah. Jangan-jangan disabilitas hanya digunakan</p>	<p>Akar masalahnya jika tidak diselesaikan maka masalahnya akan ada terus. Misalnya seperti anda kesulitan untuk akses karena gedung ini dibangun tidak dipersiapkan untuk disabilitas. Dan saya bicara disabilitas bukan karena pilpres, tapi itu dikerjakan karena itu komitmen kemanusiaan yang sudah dilakukan sejak bertugas di kemendikbud. Di Jakarta, semua bangunan baru milik pemerintah yang dikerjakan ahrus rama penyandang disabilitas, yang lama secara bertahap dilakukan koreksi. Kemudian, setiap membahas disabilitas selalu saya tambahkan 3 (perempuan, anak, dan lansia) begitu seterusnya, kenapa? Karna saat saya mengelola wilayah, jika empat kelompok masyarakat rentan ini tertangani dengan baik, maka yang lainnya akan tertangani. Dan ini sifatnya rekaman yang bisa ditagih, janjinya</p>

untuk komoditas politik saja?

pakai rekaman itu bisa ditagih. Kenapa kita memilih untuk terbuka begini? Supaya kita ke depan bisa saling mempertanggung jawabkan apa yang sudah direncanakan sebagai kerja bersama sebuah masyarakat.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari kondisi awal (tesis) terlihat bahwa ada isu kampanye Anies Baswedan yang tidak ramah disabilitas, padahal setiap kampanye Anies selalu menggaungkan tentang peduli disabilitas yang menciptakan kekhawatiran bahwa Anies Baswedan hanya menggunakan isu disabilitas sebagai komoditas politik (antithesis). Dalam hal ini, Anies Baswedan menyampaikan bahwa rekam jejak pemerintahannya selama menjadi gubernur di Jakarta menunjukkan banyak gedung baru yang dibangun dengan memperhatikan akses untuk disabilitas, dan gedung lama diperbaiki secara bertahap, jadi kepedulian ini bukan hanya untuk meraih simpati selama masa kampanye. Anies Baswedan selalu memperhatikan kenyamanan disabilitas, perempuan, lansia, dan anak-anak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil tersebut, Anies Baswedan adalah tipikal yang menjawab pertanyaan dalam berdialog secara tersruktur dengan komposisi standar; pembukaan, isi dan penutup. Hal ini dilakukannya untuk menunjukkan pemahamannya akan tesis (kondisi awal), antithesis (kondisi yang berlawanan), dan sintesis (kondisi yang lebih baik). Selama proses tersebut berlangsung, Anies Baswedan selalu memberikan contoh sebagai contoh penalaran agar lawan bicaranya dapat memahami logika yang ingin disampaikan. Jadi, Anies Baswedan tidak langsung menjawab secara singkat karena ada kecenderungan untuknya menjelaskan lebih panjang agar dapat mudah dipahami. Meski begitu, pertanyaan yang diajukan selalu dapat dijawab secara tepat dan terstruktur oleh Anies Baswedan, jadi tidak hanya sekedar “muter-muter”, tetapi ada isi yang disampaikan. Program “Desak Anies” memberikan persepektif baru tentang kebiasaan kampanye yang dapat dilakukan oleh calon pemimpin di masa depan, yakni dengan kemauan untuk hadir dan berdiskusi secara langsung dengan masyarakat dari berbagai latar belakang. Hal ini menumbuhkan semangat masyarakat, khususnya generasi Milenial dan Z untuk sadar politik; berkeinginan untuk belajar tentang perpolitikan Indonesia dan mampu memutuskan calon pemimpin terbaik untuk mereka nantinya. Konsep dari “Desak Anies” ini menunjukkan bagaimana seharusnya prinsip-prinsip demokrasi secara sederhana dapat dicontohkan oleh pemimpinnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Ahmad. (2023). *Gaya Bicara Anies Dianggap Muter-Muter dan Teoritis*, Refly Harun: Tipikal Dialogis, Bukan Teriak-Teriak. RMOL.ID-Republik Merdeka; Kantor Berita Ekonomi & Politik. Uploaded by RMOL.ID-Republik Merdeka; Kantor Berita Ekonomi & Politik on 2 October 2023. <https://rmol.id/politik/read/2023/10/02/591447/gaya-bicara-anies-dianggap-muter-muter-dan-teoritis-refly-harun-tipikal-dialogis-bukan-teriak-teriak>
- Aziz, Asep Rifqi Abdul Aziz. (2022). *Korelasi Dialektika Hegel dan Pancasila*. Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat. e-ISSN: 2829-6958 * <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/>. Volume 5 Nomor 1, Mei 2022.
- CNN Indonesia. (2024). *Media Asing Soroti Anies Gaet Pemilih Muda Pakai “Desak Anies”* <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240104112856-106-1045163/media-asing-soroti-cara-anies-gaet-pemilih-muda-pakai-desak-anies>
- Fatiha, Alifia Silvi, et.al. (2022). *Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora, Vol.1, No.3, Januari 2022. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/1159/785>

- Rangkuti, Maksum. (2023). Ciri-Ciri Negara Demokrasi: Fondasi Pemerintahan Rakyat. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://fahum.umsu.ac.id/ciri-ciri-negara-demokrasi-fondasi-pemerintahan-rakyat/>
- KPU. (2023). Mellaz: Anak Muda, Penting untuk Melek Politik. Uploaded by kpu.go.id on January, 26 2023. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11375/mellaz-anak-muda-penting-untuk-melek-politik>
- Soekarwo. (2021). Partisipasi Politik dan Digitalisasi Pemilu di Indonesia. Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. <https://wantimpres.go.id/id/2021/12/partisipasi-politik-dan-digitalisasi-pemilu-di-indonesia/>
- Maspul, Kurniawan Arif. (2024). Reimagining Democracy: An Exploration of Anies Baswedan's "Desak Anies" Program. Indonesian Journal of Social Development Volume: 1, Nomor 3, 2024, Hal: 1-13. <https://doi.org/10.47134/jsd.v1i3.2243>
- UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). (2023). Generasi Muda Harus Melek Politik. Uploaded by UMY on Desember 29, 2023. <https://www.umy.ac.id/generasi-muda-harus-melek-politik>
- MetroTV. (2024). Desak Anies- Warga Semarang Desak Anies Baswedan. YouTube, uploaded by MetroTV on Feb 5, 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=73S8BD8XnPA>